



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Agustus 2024/Khusus - Calon PN)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)
UNIT KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENDRAJONI
2. Jabatan : CALON BUPATI
3. NHK : 166313

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **6.770.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/330 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/345 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/250 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 4 m2/4 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.010.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 9 m2/9 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/345 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 760.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **550.000.000**

1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2007, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 200.000.000
2. MOTOR, FORTUNER MINI BUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000



3. MOBIL, CAMRY SEDAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 442.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 428.200.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 8.190.200.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.190.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Agustus 2024/Khusus - Calon PN)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)
UNIT KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RISNALDI IBRAHIM
2. Jabatan : CALON WAKIL BUPATI
3. NHK : 48316

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/252 m2 di KAB / KOTA
PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 693.300.000

1. MOBIL, SUZUKI ESCUDO JEEP Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp.
40.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOPY SPORTY Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000
3. MOTOR, YAMAHA FINO BEBEK Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000
4. MOTOR, ALL NEW NMAX 155 MATIC Tahun 2023, HASIL
SENDIRI Rp. 36.300.000
5. MOBIL, PAJERO MINI BUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
450.000.000
6. MOBIL, L 300 PICK UP Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.019.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 332.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.544.300.000



III. HUTANG

Rp. 1.000.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.544.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAWARDI ROSKA
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 252661

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	3.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.670.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	100.000.000
Sub Total	Rp.	105.670.000
III. HUTANG	Rp.	227.282.248
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-121.612.248

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.